

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK
PEKERJA DI PT. POS INDONESIA BERDASARKAN
PUTUSAN NO. 207/PDT.SUS.PHI/2018/PN.BDG
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Disusun oleh :

Reza Faadli Noorrahman

41151010150009

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL REVIEW ABOUT FULFILLMENT OF WORKER'S
RIGHT IN PT. POS INDONESIA BASED ON DECISION
NUMBER 207/PDT.SUS/PHI/2018/PN.BDG CONNECTED WITH
LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT
JUNCTO LAW NUMBER 2 OF 2004 CONCERNING
COMPLETION OF INDUSTRIAL RELATION**

CASE STUDY

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

By :

Reza Faadli Noorrahman

41151010150009

Specificity Program : Civil Law

Supervisor :

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Faadli Noorrahman

NPM : 41151010150009

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DI PT. POS INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 207/PDT.SUS.PHI/2018/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Reza Faadli Noorrahman

41151010150009

Abstrak

Studi Kasus ini membahas mengenai pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hukum otonom bagi para pihak yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan atas konsensus/kesepakatan dan kebebasan berkontrak, maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut merupakan Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Apabila salah satu dari pihak melanggar atau tidak memenuhi Hak dan Kewajibannya maka bisa ditempuh dengan diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial, dan Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan para pihak terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Penulisan dalam studi kasus ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan objek yang dianalisa. Dengan metode sebagaimana dimaksud, tujuan yang hendak dicapai adalah para pihak yang membacanya dapat memahami dan mengerti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kasus yang sedang terjadi atau yang telah terjadi.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A dalam memberikan putusan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim, hanya saja ada satu gugatan yang ditolak oleh hakim tetapi menurut penulis harusnya bisa dikabulkan dan merekomendasikan supaya merevisi atau menyusun ulang Pasal yang mengatur tentang uang transportasi, Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, Perselisihan Hubungan Industrial, Upaya Hukum

Abstract

The case study discusses violations of the Collective Labor Agreement (CLA) between the Company and Trade Unions based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment of Juncto Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations. Collective Labor Agreement (PKB) is an autonomous law for the parties that contains terms of work, rights and obligations of the parties based on the principle of consensus / agreement and freedom of contract, then the Collective Labor Agreement (CLA) is the act for the parties make it. If one of the parties violates or fails to fulfill their rights and obligations, then it can be accomplished by resolving through bipartite negotiations, in the event that bipartite negotiations fail, then the settlement is carried out through a mediation or conciliation mechanism. If mediation and conciliation fail, industrial relations disputes can be requested to be resolved in the Industrial Relations Court. The aim of this study is to determine the Judge's legal considerations in examining and deciding cases on Industrial Relations Disputes, and what legal remedies can be carried out by parties to the decision of the Industrial Relations Court.

The method of this case study uses normative juridical research methods. The data collection method in this study uses the study of documents or primary library materials on secondary data. The data obtained and that have been collected both primary and secondary data are processed by searching, inventorying and studying secondary data relating to the object being analyzed. With the method as intended, the goal in this study is that those who read it can understand and comprehend the laws and regulations that apply to cases that are happening or that have already happened.

The conclusion in this study is the Panel of Judges of the Industrial Relations Court at the Bandung District Court in the Class IA in providing an appropriate and in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia and with all the considerations made by the Panel of Judges, only there is one lawsuit which was rejected by the judge but according to the author it could be granted and recommended that the revision or rearrangement of the article governing transportation money, in deciding this case the Panel of Judges give a legal considerations in accordance with the Collective Labor Agreement made by both parties.

Keywords: Violation of Collective Labor Agreement, Industrial Relations Disputes, Legal Efforts

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DI PT. POS INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 207/PDT.SUS.PHI/2018/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga Tugas Akhir ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaiannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

10. Teman seperjuangan kelas A1 terkhusus anak-anak MAC serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 dan KKNM 27 Arcamanik Citarum Harum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman seperjuangan Dariel Fadhilah Konjala, Arya Wicaksana, Aditya Insani, Rizky Wahyu Putra, Rudi Setiawan, Mega Islamiyati, Muhamad Fajar Shidiq.
12. Teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis Ravialli A Mahendra, Mochammad Mulfii, Wiliansyah, Bagja Putra Iriana, M Bayu Ilham, Navian Adi Alamanda, Adjie Suryana, Sanjay Malik, Rina Mardiana, Muhamad Faishal Ruslan Nasution, Aldy Rizki Pratama.
13. Teman – teman di organisasi dan komunitas yang selalu mendukung dan menghiasi masa – masa kuliah penulis yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, Maray Online Community, Koperasi Mitra Jaya Transportasi (Maray Trans), GMI Bandung Raya, T-BRAC BROTHERHOOD MC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Lilis Roslina ZA, Ayahanda Agus Darmawan, dan Kakak Chandra Faza Darmawan. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah

mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, 5 September 2019

Reza Faadli Noorrahman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	7

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg ?.....	12
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan para pihak terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg ?.....	12

B. Tinjauan Teoritik

1. Perusahaan.....	12
2. Perusahaan Perseroan (Persero).....	19
3. Tenaga Kerja	25
4. Serikat Pekerja/Buruh.....	29
5. Perjanjian Kerja Bersama.....	34

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	40
7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	45
8. Mekanisme Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial.....	50
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Putusan.....	54
B. Pertimbangan Hukum.....	57
BAB IV ANALISIS KASUS	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hubungan Industrial Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.....	61
B. Upaya hukum para pihak terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.....	67
BAB V KESIMPULAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	